

**KOORDINASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BERSAMA DEWAN
KERAJINAN NASIONAL DAERAH DALAM MEMBERDAYAKAN PENGRAJIN
KARAWO DI KABUPATEN GORONTALO**

Amelia Patriccia Pobi

NPP.32.0958

Asdaf Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo

Program Studi Pe, bangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Email: amelpobi@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Heru Sulistiyo S.Sos., M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The author focuses on the problem of the low level of welfare of karawo craftsmen due to lack of knowledge and empowerment of them. **Purpose:** The objective of this study is to determine the extent of coordination carried out by the Department of Industry and Trade together with the Regional National Craft Council in empowering karawo craftsmen in Gorontalo Regency. **Method:** The research method used is qualitative research with a descriptive method with coordination measurement parameters according to Handyaningrat. **Results/Findings:** The results obtained in this study, the coordination that has been implemented is still not entirely good. It can be seen from the imperfect parameters used by the author; namely, formal communication that occurs is still very rare due to several factors and also the absence of a specific written agreement regulating this coordination. **Conclusion:** The coordination that occurs between the Department of Industry and Trade together with the Regional National Craft Council in empowering karawo craftsmen cannot be said to be optimal. This is based on the imperfection of two of the three parameters for measuring the level of coordination.

Keywords: Regional National Craft Council, Department of Industry and Trade, Coordination; Empowerment

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus kepada permasalahan rendahnya tingkat kesejahteraan para pengrajin karawo karena kurangnya pengetahuan dan pemberdayaan kepada mereka. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah dalam memberdayakan pengrajin karawo yang ada di kabupaten Gorontalo. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode dekriptif dengan parameter pengukuran koordinasi menurut Handyaningrat. **Hasil/Temuan:** Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini koordinasi yang sudah terlaksana masih belum sepenuhnya baik. Terlihat dari tidak sempurnanya parameter yang penulis gunakan yakni, komunikasi formal yang terjadi masih sangat jarang diakibatkan oleh beberapa faktor dan juga belum adanya kesepakatan tertulis yang spesifik mengatur mengenai koordinasi ini. **Kesimpulan:** Koordinasi yang terjadi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah dalam memberdayakan pengrajin karawo belum dapat dikatakan masimal. Hal ini berdasarkan kepada belum sempurnanya dua dari tiga parameter untuk mengukur tingkat koordinasi tersebut.

Kata Kunci: Dewan Kerajinan Nasional Daerah , Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koordinasi ;Pemberdayaan.

I. PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang bermakna berbeda beda tetap satu jua. Semboyan negara kita ini mengisyaratkan bahwasanya Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan tentang adat istiadat, budaya juga kearifan lokal. Keragaman ini terlihat jelas pada semua aspek baik itu suku, budaya, adat istiadat termasuk juga kerajinan pada tiap daerah yang mencerminkan keunikan daerah tersebut. Keanekaragaman dan juga kekayaan alamnya menjadikan setiap daerah memiliki ciri kedaerahannya yang memuat nilai nilai budaya dan menghasilkan potensi yang sangat besar.

Provinsi Gorontalo merupakan salah satu provinsi yang berada di Negara Kesatuan republik Indonesia. Provinsi ini dikenal dengan julukan ”Serambi Madinah”. Meski tak seluas provinsi lain, provinsi Gorontalo menyimpan banyak keragaman suku, adat, budaya, keindahan alam, dan kearifan lokal. Kabupaten Gorontalo adalah salah satu kabupaten yang berada di wilayah provinsi Gorontalo. Kabupaten Gorontalo dikenal dengan kerajinan lokal Karawo yang sangat indah, yang memiliki potensi unggul dalam pengembangan dan popularitasnya.

Karawo ialah sebuah gaya dalam menciptakan ornamen pada sebuah objek berupa wastra , yang melewati proses perancangan atau desain, pengirisan, dan juga penarikan dari bagian tertentu pada objek wastra guna menciptakan bidang dasar, dan penyulaman ulang serat objek wastra yang ditarik guna menghasilkan motif-motif (I. S. Sudana, 2019). Hak paten bahwa Karawo adalah kerajinan asli daerah Gorontalo ditandai dengan dikeluarkannya nomor paten: ID 0012784 yang dikeluarkan Dirjen HKI, pada 20 Januari 2006 melalui Sertifikat paten tahun 2006 (Muh Nasir, 2015).

Potensi daya Tarik dari kain karawo sendiri terdapat pada proses pembuatannya dan juga hasil sulaman yang indah dan rapih. Keunikan sulaman karawo juga terletak pada bentuk motifnya, yang menjadikan karawo tersebut memiliki keunikan tersendiri (I. W. Sudana et al., 2009). Karawo merupakan kerajinan eksklusif nan indah, yang mencerminkan ketekunan dari para pengrajin ketika membuatnya. Selain keindahan, karawo mampu memancarkan ketulusan hati juga kerja keras para pengrajin dalam menghasilkan produk tersebut. Sehingga, karawo merupakan kerajinan yang mempunyai peluang besar untuk populer dan diminati.

1. 2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP)

Indonesia's cultural diversity is one of its greatest assets, but it also poses challenges for governance. The country is home to more than 300 ethnic groups, each with distinct cultural traditions. Ensuring that this diversity is respected and promoted requires inclusive policies that recognize and support (Saputra, 2024). Dalam karya dengan judul *Governance Frameworks and Cultural Preservation in Indonesia: Balancing Policy and Heritage*, Romi mengutarakan bahwa keberagaman Indonesia yang sangat banyak justru menjadi tantangan tersendiri bagi negara untuk mengelolanya, seperti halnya karawo yang belum mampu dioptimalkan potensinya oleh pemerintah.

Potensi karawo yang begitu besar harusnya bisa di manfaatkan oleh pemerintah melalui para pengrajinnya. Menurut data yang didapatkan dari Disperindag kabupaten Gorontalo bahwa sebagian besar pengrajin merupakan wanita dengan usia diatas 35 tahun yang pasti membutuhkan pendampingan juga pelatihan agar mereka bisa menghasilkan kain karawo sesuai dengan zamannya yang tentunya dengan motif motif terbaru yang lebih bervariasi. Menurut data yang kembali penulis dapatkan dari Disperindag bahwa terjadi kesenjangan antara jumlah produksi karawo dan juga jumlah karawo yang terjual. Hal ini terlihat pada angka produksi yang semakin

tahun meningkat namun tidak diiringi dengan angka minat beli masyarakat. Hal ini yang pada akhirnya memicu kerugian yang besar bagi pengrajin karawo.

Ke-eksklusifan, Potensi dan juga daya tarik yang besar dari kain karawo harusnya ikut berbanding lurus dengan kepopulerannya dan tak lupa juga dengan kesejahteraan para pengrajin karawo. Namun, pada realitanya potensi dan juga daya tarik karawo belum mampu untuk menjadikan kerajinan yang satu ini bersaing dengan kerajinan lainnya. Pada kenyataannya karawo masih jauh tertinggal bahkan tak terdengar namanya seperti halnya batik solo.

Potensi yang sangat besar karawo hingga saat ini belum bisa dimanfaatkan dan dioptimalkan dengan baik oleh pemerintah. Para pengrajin karawo masih belum bisa diberdayakan dengan maksimal. Banyak pengrajin karawo yang tidak bisa bersaing dengan para pengrajin kerajinan lainnya dan juga tidak memiliki skill lebih dalam membuat pola kekinian yang akhirnya gulung tikar. Oleh karenanya, peran pemerintah terkait sangat dibutuhkan dan diperlukan mengenai hal ini adalah koordinasi antar *stakeholder* yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo dan juga Dewan Kerajinan Nasional Daerah Gorontalo.

Menciptakan sinergi antara Disperindag dan Dekranasda merupakan Langkah yang tepat dalam memecahkan masalah dan menciptakan program yang berkelanjutan dan efektif. (Lambelanova, n.d.) dalam karya yang berjudul *Government Role In Influencing Creative Economy For Community Purchasing Power*, mengungkapkan bahwa pemerintah memiliki peran strategis dalam hal ini diantaranya, pemerintah memiliki wewenang dalam pemberian modal, pemerintah sepatutnya menjalin kerjasama dan koordinasi hingga pemberian pelatihan promosi kepada pelaku usaha. Hal yang di angkat tersebut juga senada dengan program koordinasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Gorontalo bersama Dewan Kerajinan Nasional daerah. Koordinasi dan juga kerjasama dari Disperindag dan Dekranasda selaku *stakeholder* terkait adalah jawaban yang selama ini di nantikan oleh para pengrajin. Koordinasi yang baik dan berhasil akan membuat para pengrajin Karawo Merasa terbantu dalam menyelesaikan masalah yang selama ini ada.

1. 3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu baik dalam konteks koordinasi maupun dalam konteks pemberdayaan. Penelitian Dessy Debrilianti dengan judul *Peran Dan Koordinasi Antar Instansi Dalam Pemberdayaan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan*. (Dessy Debrilianti W, 2013), menemukan bahwa koordinasi dilaksanakan oleh Lemabga Pemasyarakatan Klas II B Kota Pasuruan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan kota Pasuruan dalam budidaya ikan air tawar, mengacu kepada peran pembagian tugas dan wewenang berdasarkan peran fungsionalnya. Koordinasi yang dilakukan sudah seimbang sehingga menciptakan kemandirian pengelolaan budidaya ikan air tawar. Berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Retno Ayu Tia dengan judul *Koordinasi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pematang Kerasan Rejo*. (Tia, 2023) dalam penelitian ini menemukan bahwa kepemimpinan bdalam pemberdayaan masyarakat sudah berjalan cukup baik, tetapi masih ada beberapa hal yang menjadi kendala karena adanya perkumpulan warga yang memilik pendapat dan pandangan tersendiri atas kehidupannya, sehingga berpengaruh kepada partisipasi masyarakat yang masih kurang maksimal. Penelitian selanjutnya berjudul *Koodinasi Camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Malalayang Kota Manado* oleh (Tampake, 2018), menemukan bahwa aspek partisipasi masyarakat dalam musrembang sudah baik karena penyelenggaraan musrembang tersebut sudah sesuai dengan aturan, sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Camat sudah berjalan baik, dengan komunikasi yang bertahap. Namun, ketidakpastian program menjadi kendala dalam kegiatan ini, selanjtnya

adalah program pemberdayaan masyarakatnya yakni pemberian bantuan beras miskin yang belum sepenuhnya efektif karena penerima yang tidak layak dalam hal ini mengindikasikan kesalahan dalam penentuan sasaran penerima bantuan. Selanjutnya adalah penelitian oleh Nurul Hasmi Apriliana dengan judul penelitian Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Bontomarannu Kabupaten Gowa. (Aprillia et al., 2021) menemukan bahwa faktor pendukung koordinasi pemerintah desa dalam pemberdayaan **kelompok tani** adalah komunikasi yang intens dan lancar, didukung oleh penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi yang efektif. Sedangkan faktor penghambatnya berupa keterbatasan jaringan internet dan telepon di daerah pelosok, serta masih adanya anggota kelompok tani yang tidak memiliki atau menggunakan handphone, yang menyebabkan keterlambatan informasi. Penelitian terakhir yang dijadikan sebagai bahan referensi adalah penelitian dengan judul Koordinasi Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak oleh (Kartini, 2015). Penelitian tersebut menemukan bahwasanya kesatuan tindakan dalam sebuah koordinasi sudah banyak menyelesaikan masalah yang terjadi, namun yang harus lebih di perhatikan adalah kurangnya kepedulian terhadap kasus kasus KDRT mengakibatkan koordinasi dengan instansi eksternal masih sangat lemah.

1. 4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum pernah dilakukan sebelumnya, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pemberdayaan terhadap para pengrajin karawo sebagai bentuk dari adanya koordinasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah kabupaten Gorontalo. Selain itu, dimensi dan indikator yang menjadi parameter pengukuran keberhasilan koordinasi juga berbeda yakni menggunakan teori koordinasi yang dikemukakan oleh (Handayani, 1989) Komunikasi, Kesepakatan dan Komitmen dan juga *Feedback*. Begitu juga dengan lokasi penelitian yang juga berbeda dengan penelitian terdahulu yakni di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

1. 5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Bagaimana Koordinasi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Bersama Dewan Kerajinan Nasional Dalam Memberdayakan Pengrajin Karawo di Kabupaten Gorontalo.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti memilih metode tersebut karena penelitian kualitatif memiliki berbagai jenis desain penelitian yang beragam karena harus diselesaikan dengan sifat alamiah dari penelitian kualitatif yang muncul secara tiba-tiba. Fenomena dalam penelitian kualitatif muncul secara alami sesuai dengan prinsipnya. Penelitian kualitatif juga dikenal sebagai penelitian partisipatif, Dimana desain penelitiannya bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan yang terjadi sesuai dengan fenomena yang muncul di lokasi penelitian yang sesungguhnya (Simangunsong, 2017).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam kepada 9 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo, Kepala Bidang Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Staff Bidang Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 2 orang, Ketua Dewan Kerajinan Nasional daerah Kabupaten Gorontalo, Kepala Bidang Manajemen Usaha Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Gorontalo

Beserta 3 orang pengrajin karawo. Adapun analisisnya menggunakan teori koordinasi yang digagas oleh Handyaningrat yang menyatakan bahwa koordinasi dapat diukur melalui Komunikasi, Kesepakatan dan Komitmen dan juga *Feedback*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis koordinasi yang terjadi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah dalam memberdayakan pengrajin karawo berlandaskan teori yang dikemukakan oleh (Handyaningrat, 1989) yang dapat diukur melalui tiga parameter yakni:

3.1. Komunikasi

Dalam proses berlangsungnya koordinasi tersebut, komunikasi merupakan aspek utama dari adanya koordinasi yang berpengaruh terhadap alur informasi yang beredar dan dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait (Handyaningrat, 1989). *Communication plays an important role in building and strengthening social relationships between individuals and groups. In dialogue activities with stakeholders, there are people who express their opinions and desires regarding the program. The government then listens and accommodates these aspirations* (Setiawan et al., 2025) karyanya Indra Setiawan, Asep Hendra dan Johanes mengemukakan bahwa komunikasi merupakan hal yang krusial bagi pemerintah sebagai penentu kebijakan. Dalam hal komunikasi, penulis melakukan wawancara kepada beberapa informan yang salah satunya adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo dalam wawancara yang peneliti lakukan bahwa:

Koordinasi yang terjadi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Dekranasda Kabupaten Gorontalo berlangsung sudah sejak lama termasuk setelah saya bertugas koordinasi tersebut sudah berjalan. Komunikasinya berjalan baik, walaupun memang tidak sepenuhnya sempurna. Masih terdapat beberapa masalah contohnya miskomunikasi antar satu sama lain masih sering terjadi. Contoh dari miskomunikasi yang sering terjadi instruksi yang saya sampaikan itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik atau juga di terima secara berbeda antara setiap orangnya, sehingga sering terjadi kesalahpahaman dan ketidaksinkronan antara satu anggota dan lainnya.

Wawancara selanjutnya peneliti lakukan kepada ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Gorontalo di rumah dinas ia mengutarakan bahwasanya “selama ini sudah baik, tetapi memang masih ada yang perlu ditingkatkan karena sering terjadi miskomunikasi”. Miskomunikasi yang dimaksud disini berupa tidak selaras perintah dengan apa yang dikerjakan karena faktor buruknya komunikasi yang terjadi.

Menurut Handyaningrat proses berlangsungnya komunikasi dapat dilakukan dengan 2 cara yakni dengan komunikasi formal dan juga komunikasi nonformal. Komunikasi formal merupakan sebuah hubungan komunikasi yang sering digunakan dalam lembaga formal yang memiliki pedoman tertentu dalam pelaksanaannya.

Dalam hal koordinasi antara dinas perindustrian dan perdagangan bersama dewan kerajinan nasional daerah kabupaten gorontalo, bentuk komunikasi formal dan nonformal sudah lama terjalin dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan apa yang diutarakan oleh ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Gorontalo dalam wawancara yang peneliti lakukan di kediamannya, yakni:

Selama ini memang kami mengadakan rapat rutin dan rapat evaluasi sebagai wadah komunikasi formal namun pada pelaksanaannya rapat rutin tersebut tidak terselenggara sebagaimana harusnya. Rapat yang terselenggara hanyalah rapat evaluasi yang diadakan selesai sebuah event itupun tidak selalu terlaksana. Terlaksana mungkin jika rapat tersebut

menyangkut dengan event besar seperti festival danau limboto dan juga festival karawo diadakan.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang penulis dapatkan dapat diketahui bahwasanya komunikasi yang terjadi antara Disperindag dan juga Dekrnasda sudah terjalin namun pada pelaksanaannya belum maksimal. Hal ini dipicu karena masih sering terjadi missskomunikasi, yang dimana arahan yang diberikan oleh atasan sering disalah artikan oleh tindakan staff. Selain itu, komunikasi formal seperti rapat dan pertemuan resmi yang sangat jarang dilaksanakan juga menjadi faktor pendorong dari belum efektifnya koordinasi yang berjalan. Namun, komunikasi informal yang bisa dikatakan komunikasi secara santai biasa di lakukan dengan berbagi informasi dalam *WhatsApp* yang tentunya intensitas komunikasi nonformal yang terjadi lewat jejaring sosial bisa memperlancar terjadinya koordinasi.

3.2. Kesepakatan dan Komitmen

Dalam menjalankan sebuah koordinasi maka diperlukan sebuah kesepakatan yang bersifat mengikat antara kedua pihak untuk kemudian dilaksanakan. Kesepakatan ini juga berarti kedua pihak yang melaksanakan koordinasi sudah terikat kontrak dan tanggungjawab terhadap apa yang sudah di sepakati bersama. Melalui komitmen yang ada di antara kedua pihak yang akhirnya dapat menjunjung tinggi kesepakatan yang telah disepakati bersama maka dapat dikatakan koordinasi sudah berjalan dengan baik (Sudi Rohman, 2017). Pada hakikatnya koordinasi merupakan usaha dalam menyatukan unit atau bagian sehingga menjadi kesatuan yang bulat untuk melaksanakan tugas dan mencapai tujuan yang sama dari adanya koordinasi (Handyaningrat, 1989).

Dalam menjalankan koordinasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Dewan Kerajinan Nasional daerah menggunakan dua bentuk kesepakatan yakni kesepakatan tertulis dan tidak tertulis. Hal tersebut diutarakan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Gorontalo guna mengetahui bentuk kepekatan apa saja yang ada dalam koordinasi yang dilaksanakan. “Bentuk kesepakatan yang ada dalam rangka koordinasi bersama Dekranasda kabupaten Gorontalo ini ada dua, tertulis dan juga tidak tertulis.”

Penggunaan dua bentuk kesepakatan tersebut dijelaskan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo karena jika hanya menggunakan satu bentuk kesepakatan tertulis berupa peraturan bupati nomor 27 tahun 2022 yang menerangkan tugas dari masing masing sehingga diperlukan adanya koordinasi namun tidak terdapat kesepakatan tak tertulis yang merupakan norma, dan dasar dalam beretika sebagai ASN maka semua akan berantakan. Oleh karenanya, kesepakatan tidak tertulis yang berupa norma dalam bertindak dan menjalankan koordinasi dan komunikasi sangat diperlukan guna mendukung berjalannya kegiatan dari koordinasi yang dilaksanakan. Sehingga dalam menjalin koordinasi tetap diperlukan kedua bentuk kesepakatan yakni tertulis berupa dasar hukum dan tidak tertulis berupa kesepakatan untuk kenyamanan kita bersama walaupun sebenarnya dekranasda merupakan bagian melekat dari industri Disperindag. Kesepakatan tidak tertulis yang dijalankan itu sendiri berupa sikap saling menghargai dan menghormati dan juga sikap tanggung jawab terhadap tugas yang di emban setiap individu.

Koordinasi yang dijalankan oleh Disperindag dan juga Dekranasda itu sendiri membuahkan sebuah kegiatan pemberdayaan yang sudah di laksanakan. Kegiatan yang dilaksanakan tersebut seperti pelatihan pengirisan, pemberian bantuan modal usaha dan juga pengetahuan tentang marketing. Kegiatan yang berlangsung ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendukung agar kegiatan ini terus berjalan yang diutarakan oleh ketua Dewan kerajinan Nasional Daerah:

Faktor utama yang mendorong kami untuk terus melakukan kegiatan pemberdayaan kepada para pengrajin di Kabupaten Gorontalo. Pertama, tentu karena potensi kerajinan lokal yang cukup besar namun belum sepenuhnya berkembang secara optimal. Banyak pengrajin yang memiliki keterampilan, tapi masih terbatas dari segi manajemen usaha, pemasaran, maupun inovasi produk. Yang kedua adalah keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemberdayaan ini, kami berharap para pengrajin tidak hanya bisa bertahan, tapi juga berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru di lingkungannya sehingga dapat dikatakan mandiri dan berdaya.

3.3. Feedback

Feedback is information provided to individuals about their performance and can help them understand the difference between desired performance and actual performance achieved (Isa Anshori, 2023). Pengrajin karawo merasa sangat terbantu dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Disperindag dan Dekranasda begitu juga sebaliknya. Disperindag sebagai SKPD yang bertanggungjawab dalam hal ini bersama dengan Dekranasda yang berperan aktif merasa sangat terbantu dengan adanya respon positif dari para pengrajin yang mereka sampaikan secara langsung maupun via melalui *Whatssapp* yang dimana hal tersebut dapat menjadi dasar dalam membuat rencana kerja dan kegiatan selanjutnya. Berdasarkan apa yang disampaikan juga, dalam kacamata peneliti melihat bahwa kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk Koordinasi ini berhasil dilaksanakan.

Feedback atau umpan balik yang disampaikan dan diberikan oleh pengrajin ini tentunya menjadi sangat penting karena akan menjadi dasar pertimbangan dari sebuah kebijakan dan keputusan yang akan diambil. *Feedback* yang diberikan juga dapat dijadikan alat ukur ada tidaknya perubahan setelah terlaksananya kegiatan pemberdayaan tersebut.

Tahun	Jumlah Produksi	Jumlah Terjual
2020	4.750	4.250
2021	6.200	3.800
2022	11.750	5.200
2023	13.200	6.000
2024	15.120	9.300

Sumber: Disperindag kabupaten Gorontalo (dioleh oleh penulis)

Data tersebut menunjukkan kepada kita bahwa terjadi lonjakan pembeli pada tahun 2024. Senada dengan hal tersebut, ketua Dekranasda Kabupaten Gorontalo menyampaikan bahwa pengrajin karawo sekarang sudah lebih bergerak maju. Meskipun perubahan tersebut tidak secara signifikan dan besar tetapi mereka sudah lebih baik dari sebelumnya. Perubahan tersebut juga dirasakan langsung oleh pengrajin karawo yang penulis temui. Dalam wawancara tersebut beliau menyatakan bahwa pemberdayaan yang dilaksanakan sudah berjalan sangat baik dan dapat dirasakan manfaatnya, dimana sekarang dia sudah memiliki toko kain karawo sendiri padahal dulunya ia hanya berjualan di emperan toko.

Kemajuan yang ada merupakan sebuah hasil dari adanya koordinasi namun, untuk mempertahankan dan meningkatkan kemajuan tersebut tentu diperlukan upaya lanjutan dari kedua pihak yang menjalin koordinasi. Berlandaskan hal tersebutlah maka peneliti melakukan wawancara mengenai apakah ada langkah lanjutan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengungkapkan bahwa “tentu saja ada langkah lanjutan untuk kemudian mempertahankan perkembangan ini. Contohnya terus melakukan pemantauan, evaluasi juga pelatihan secara berkala dengan harapan kita bisa mencakup semua pengrajin di Kabupaten Gorontalo”

Dalam memperthankan perkembangan pengrajin karawo yang bergerak ke arah positif ini, maka dinas Perindustrian dan Perdagangan juga Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Gorontalo akan melakukan langkah sebagai bentuk lanjutan untuk memperthankan apa yang sudah baik dengan melakukan pemantauan dan pemberian pelatihan secara terus menerus kepada para pengrajin karawo.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Koordinasi yang terjadi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Gorontalo dalam memberdayakan pengrajin karawo belum dapat dikatakan maksimal. Pelaksanaan koordinasi tersebut masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dewan kerajinan Nasional daerah memainkan peran yang sangat strategis menurut tugas dan fungsi mereka masing masing. Dalam hal ini penulis menemukan hal yang sangat menarik dalam penelitian yang dilakukan. Koordinasi yang dilaksanakan ini terjadi secara internal, dimana berbeda dengan daerah lainnya yang Dekranasda tidak melekat pada dinas manapun sedangkan di kabupaten Gorontalo Dekranasda merupakan organisasi yang melekat di bidang industri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo. Hal inilah yang kemudian membuat koordinasi yang berjalan memang harus dijalankan. Dimana, masing masing dari Dinas maupun Dekranasda menjalankan tugasnya dengan baik dan saling melengkapi dalam rangka pemberdayaan bagi para pengrajin karawo. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai pemberi akses, penmbri kebijakan dan sebagai pemilik anggaran sedangkan Dekranasda menjalankan tugasnya sebagai fasilitator baik itu sebagai penyalur bantuan maupun sebagai tim yang turun langsung ke lapangan pada saat kegiatan pemberdayaan berlangsung.

Peneliti juga menemukan temuan yang tak kalah menarik perhatian, dimana koordinasi yang berjalan ini berlandaskan kepada peraturan bupati yang tidak secara spesifik mengatur mengenai koordinasi ini. Sehingga dalam pelaksanaan koordinasi tersebut lebih menekankan kepada norma, etika dan juga sikap saling menghargai satu sama lain dan juga sikap tanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan dan yang menjadi tanggung jawabnya. Temuan berikutnya adalah kegiatan pemberdayaan ini dilaksanakan karena pengrajin karawo yang hingga saat ini belum bisa sejahtera karena potensi karawo yang sangat besar tidak dapat di maksimalkan oleh pemerintah. Temuan inilah yang kemudian senada dengan penelitian yang dilakukan oleh (Maryuni et al., 2021).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dimensi berupa komunikasi, kesepakatan dan komitmen dan juga *feedback* yang dimana dalam kacamata penulis dimensi ini lebih berfokus untuk mengukur seberapa baik koordinasi ini berjalan antara kedua pihak. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tia, 2023) yang menggunakan dimensi berfkus kepada kinerja individu yang ada dalam kecamatan tersebut sebagai bahan penunjang dalam kegiatan pemberdayaan yang akan dilaksanakan nantinya.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai koordinasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah dalam memberdayakan pengrajin karawo di kabupaten Gorontalo, dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang dijalankan belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan belum terpenuhinya dua dari 3 elemen utama sebagai parameter pengukuran tingkat keberhasilan koordinasi menurut (Handayaniingrat, 1989) yakni; Komunikasi, Kesepakatan dan Komitmen, dan juga *Feedback*.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Gorontalo belum mampu membangun dan menjalin komunikasi yang baik yang di kuatkan dengan masih jaranganya terjadi rapat atau pertemuan santai karena faktor waktu dan kesibukan lain yang membuat terjadi banyaknya misskomunikasi. Kesepakatan dan Komitmen yang mengatur mengenai koordinasi ini secara spesifik belum ada, namun berpatokan kepada Peraturan Bupati dan juga menjalankan peraturan tak tertulis berupa norma norma yang melekat di masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan, Disperindag dan Dekranasda banyak melakukan kegiatan pemberdayaan yang bagus namun belum juga dapat dikatakan sempurna. *Feedback* yang di berikan oleh pengrajin karawo terhadap Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga Dekranasda sangat baik. Pengrajin selalu menanggapi setiap kegiatan dengan antusias sehingga terjadi perubahan ke arah yang lebih baik setelah kegiatan berlangsung.

Belum sempurnanya dua dari tiga elemen utama koordinasi tersebut menandakan bahwa koordinasi yang dijalankan belum seutuhnya maksimal. Hal tersebut mengakibatkan belum banyak terjadi perubahan secara spesifik kepada pengrajin karawo karena koordinasi yang belum maksimal mengakibatkan belum semua pengrajin dapat merasakan kegiatan pemberdayaan tersebut.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini lebih memfokuskan pada koordinasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah dalam memberdayakan pengrajin karawo di Kabupaten Gorontalo. Keterbatasan utama penelitian ini adalah waktu dan biaya pelaksanaannya, dengan ruang lingkup yang hanya mencakup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*): Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini merupakan hasil dari tahap awal yang dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian serupa di masa yang akan datang. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo menggandeng Dewan Kerajinan nasional Daerah sebagai organisasi yang melekat pada bidang industri sebagai fasilitator dari kegiatan yang dijalankan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengoptimalkan upaya pemberdayaan pengrajin karawo di Kabupaten Gorontalo.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Berkat kerja keras, dukungan, dan kolaborasi dari berbagai pihak, penelitian ini dapat terlaksana dengan optimal dan menghasilkan temuan yang berpotensi memberikan manfaat signifikan bagi peningkatan layanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat. Semoga hasil penelitian ini dapat berkontribusi secara positif terhadap pemberdayaan pengrajin karawo di Kabupaten Gorontalo.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aprillia, N. H., Fatmawati, & Haq, N. (2021). KOORDINASI PEMERINTAH DESA DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI DESA BONTOMARANNU KABUPATEN GOWA.
- Dessy Debrilianti W. (2013). PERAN DAN KOORDINASI ANTAR INSTANSI DALAM PEMBERDAYAAN DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN.

- Isa Anshori, M. (2023). Umpan balik dan Evaluasi Terhadap kinerja Organisasi: *A Literature Review*. 3(2).
- Handayaniingrat, S. (1989). Admininstrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional.
- Kartini, D. (2015). Koordinasi Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak. 13.
- Lambelanova, R. (n.d.). *GOVERNMENT ROLE IN INFLUENCING CREATIVE ECONOMY FOR COMMUNITY PURCHASING POWER*.
- Maryuni, Kasim Yahji, & Sri Dewi Yusuf. (2021). Pengembangan Seni Karawo dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Gorontalo. 1.
- Muh Nasir. (2015). PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA MOTIF KERAJINAN KARAWO DI PROVINSI GORONTALO MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.
- Saputra, R. (2024). *Governance Frameworks and Cultural Preservation in Indonesia: Balancing Policy and Heritage*. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 11(3), 25–50. <https://doi.org/10.29333/ejecs/2145>
- Setiawan, I., Hendra, A., Nooraini, A., Lukman, S., & Johannes, A. W. (2025). *Collaborative Governance in Realizing Sombere and Smart City in Makassar City, Indonesia*. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1475(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1475/1/012020>
- Simangunsong, F. (2017). Metodologi Penelitian Pemerintahan. Alfabeta.
- Sudana, I. S. (2019). SENI KARAWO GORONTALO: BENTUK ESTETIK DAN KONSEP PENGEMBANGAN.
- Sudana, I. W., Hasdiana, & Adiatmo, F. (2009). Potensi Seni Budaya Gorontalo dan Limbah Kayu Sebagai Karya Seni Kriya Guna Mendukung Industri Creati.
- Sudi Rohman. (2017). KOORDINASI CAMAT DENGAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA WANASARI KECAMATAN MUARA WAHAU KABUPATEN KUTAI TIMUR. 5(3), 437–447.
- Tampake, R. P. (2018). Koordinasi Camat Dalam pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Malalayang Kota Manado . 3.
- Tia, R. A. (2023). Koordinasi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pematang Kerasan Rejo. 3, 25–34.